

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat juga dikatakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Angka-

angka PDRB digunakan sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan juga terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan ini diprediksi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, dari berbagai jenis anggaran belanja daerah Pemerintah Daerah mengalokasikan dana berbentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik, Dengan bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah dan anggaran daerah yang semakin besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu digali sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari daerah itu sendiri dan bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan utama pemerintahan dan pembangunan daerah baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari kemandirian daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat berupa dana perimbangan merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan saja. Oleh sebab itu jelaslah bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan. Kewenangan untuk memperdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Yani (2008:40), “pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sekitar 20%. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri dari : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Ketiga komponen dalam dana perimbang ini merupakan satu kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah lain selain sumber keuangan yang sudah ada di daerah sendiri. Pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambahkan aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang rendah dan cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Setiap daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan memaksimalkan belanja modal daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Dalam rangka mengoptimalkan tingkat pelayanan publik pemerintah daerah setempat melakukan pergeseran komposisi belanja Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya

dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktifitas pembangunan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Studi Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Sumsel 2012-2016**

<b>Kab</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
OKU	Rp 7.007.376.000	Rp 7.376.010.000	Rp 7.704.610.000	Rp 7.987.730.000	Rp 8.230.960.000
Oi	Rp 4.740.501.000	Rp 5.121.360.000	Rp 5.492.920.000	Rp 5.852.730.000	Rp 6.122.370.000
OKI	Rp 13.354.396.000	Rp 14.230.590.000	Rp 15.135.830.000	Rp 15.902.780.000	Rp 16.668.450.000
Lahat	Rp 9.003.712.000	Rp 9.479.390.000	Rp 9.937.390.000	Rp 10.317.900.000	Rp 10.537.520.000
EL	Rp 2.433.330.000	Rp 2.582.010.000	Rp 2.721.110.000	Rp 2.836.120.000	Rp 2.963.780.000
Muba	Rp 32.904.809.000	Rp 35.290.940.000	Rp 36.683.310.000	Rp 38.397.350.000	Rp 39.272.810.000
BA	Rp 12.980.038.000	Rp 13.777.760.000	Rp 14.628.960.000	Rp 15.380.590.000	Rp 16.236.000.000
ME	Rp 24.359.396.000	Rp 26.374.750.000	Rp 28.158.760.000	Rp 29.041.410.000	Rp 31.253.270.000
PLG	Rp 65.049.466.000	Rp 70.090.310.000	Rp 74.193.370.000	Rp 78.079.090.000	Rp 82.329.660.000
LL	Rp 2.767.858.000	Rp 2.943.700.000	Rp 3.042.980.000	Rp 3.235.620.000	Rp 3.439.780.000
PA	Rp 1.544.662.000	Rp 1.641.560.000	Rp 1.735.060.000	Rp 1.814.000.000	Rp 1.892.920.000
MR	Rp 9.167.471.000	Rp 9.245.290.000	Rp 9.788.570.000	Rp 10.510.080.000	Rp 11.049.700.000
OKUS	Rp 3.854.386.000	Rp 4.056.980.000	Rp 4.267.950.000	Rp 4.503.080.000	Rp 4.707.440.000
OKUT	Rp 6.485.138.000	Rp 6.951.880.000	Rp 7.435.450.000	Rp 7.821.520.000	Rp 8.354.950.000
PB	Rp 3.228.305.000	Rp 3.496.880.000	Rp 3.674.190.000	Rp 4.097.010.000	Rp 4.295.410.000

*Sumber: Hasil Audit BPK-RI Perwakilan Sumatera Selatan, 2016*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pengukuran keberhasilan program pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kondisi perekonomian regional secara makro. Angka-angka PDRB sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber penerimaan daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DBH merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan publik.

Peneliti yang membahas tentang pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Biaya Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dilakukan oleh pengarang Panggabean (2017). Hasil penelitian analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel independen adalah pad, dana perimbangan kabupaten /kota di provinsi lampung tahun 2011-2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel PAD, DHB, dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara itu variabel DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung, berdasarkan penelitian setelah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Biaya modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, adanya perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya, lokasi penelitian terdahulu

di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 dan dibuat tahun 2017 dan penelitian ini mengambil di provinsi Sumatera Selatan 2012-2016 dan pembuatan tahun 2018

Dengan hasil temuan penelitian yang berbeda-beda, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai PDRB, PAD, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penulisan ini diberi judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, pada Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2012-2016.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap anggaran pertumbuhan ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan serta belanja modal.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang, sehubungan dengan belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perguruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal.